



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1579/DJU/SK/HM.02.3/7/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA VERSI 3.2.0
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2018**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas data perkara di dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di pengadilan, maka perlu diadakan bimbingan teknis mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu menunjuk peserta yang namanya tercantum dalam keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di lingkungan Peradilan Umum;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Lingkungan Peradilan Umum
5. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-005.03.1.097450/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM
INFORMASI PENELUSURAN PERKARA VERSI 3.2.0 DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2018.**

- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk mengikuti bimbingan teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3.2.0 di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak.
- KEDUA : Peserta dibebaskan dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai tanggal 25 sampai dengan 27 Juli 2018.
- KETIGA : Setiap Pengadilan Negeri wajib melakukan sosialisasi atas materi yang diterima selama mengikuti Bimbingan Teknis di satuan kerja masing-masing dan mengirimkan laporan sosialisasi tersebut ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum cq Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor SP DIPA-005.03.1.097450/2018 tanggal 5 Desember 2017.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2018

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta;
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilum;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**NAMA PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA VERSI 3.2.0
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	H.SUDARWIN, S.H., M.H.	19611103 198803 1 002	IV/d	HAKIM TINGGI PENGAWAS PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
2.	BINTORO WIDODO, S.H.	19590601 198612 1 001	IV/d	HAKIM TINGGI PENGAWAS PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
3.	IWAN WARDHANA, S.H.	19700405 199103 1 001	IV/d	KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG
4.	ERWIN DJONG, SH., MH	19620107 199212 1001	IV/c	KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
5.	SUGIYO MULYOTO SH,MH.	19601022 199212 1 001	IV/c	KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
6.	HASANUDIN, SH. MH	19780413 200112 1 002	IV/b	KETUA PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
7.	RPB. SITOROES, SH., MH.	19730409 199903 1001	IV/b	HAKIM PENGAWAS IT PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
8.	ARIEF BOEDIONO S.H., M.H.	19730628 199903 1 002	IV/a	KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
9.	I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH.,MH	19730520 199303 1 002	IV/a	KETUA PENGADILAN NEGERI NGABANG
10.	DELTA TAMTAMA, SH, MH	19760716 200003 1 003	IV/a	KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG
11.	HENDRO WICAKSONO, S.H., M.H.	19760701 200012 1 001	IV/a	KETUA PENGADILAN NEGERI SINTANG
12.	SAPUTRO HANDOYO,S.H,M.H.	19780911 200212 1 002	IV/a	KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
13.	SURYODIYONO, S.H.	19710818 199303 1 005	IV/a	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAMBAS
14.	GUNTUR NURJADI SH	19790809 200312 1 001	III/d	HAKIM PENGAWAS IT PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
15.	VERONICA SEKAR WIDURI,S.H.	19770331 200212 2 003	III/d	HAKIM PENGAWAS IT PENGADILAN NEGERI PUTTUSIBAU
16.	DONI SILALAH, SH	19790627 200604 1 004	III/c	HAKIM PENGAWAS IT PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG
17.	EDY ALEX SERAYOX, S.H., M.H.	19790927 200604 2 003	III/c	HAKIM PENGAWAS IT PENGADILAN NEGERI SINTANG
18.	JOHN MALVINO SEDA NOA WEA SH	19820424 200704 1 001	III/c	HAKIM PENGAWAS IT PENGADILAN NEGERI SANGGAU
19.	INDRA JOSEPH MARPAUNG, SH	19851112 200805 1 001	III/c	HAKIM PENGAWAS IT PENGADILAN NEGERI NGABANG
20.	LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H	19860403 200912 2 006	III/c	HAKIM PENGAWAS IT PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH

NO.	N A M A	N I P	GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	HENDRA KUSUMA WARDHANA, S.H., M.H.	19870330 200912 1 001	III/c	HAKIM PENGAWAS IT PENGADILAN NEGERI KETAPANG
22.	SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.	19880921 201101 2 010	III/b	HAKIM PENGAWAS IT PENGADILAN NEGERI SAMBAS
23.	MOHAMAD ABDUL MUJAHID, S.H., M.H.	19590127 198303 1 002	IV/c	PANITERA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
24.	NETTA KUSUMAHATY, SH.,MH.	19590103 198303 2 002	IV/a	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
25.	MARHABAN, S.H, M.H.	19711110 199303 1 003	IV/a	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
26.	MARLIN SIMANJUNTAK S.H.,M.H	19690413 199003 1 005	IV/a	PANITERA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
27.	FRANK PESSY, SH., MH	19591212 199103 1005	IV/a	PANITERA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
28.	UTIN REZA PUTRI, SH, MH	19751030 200112 2 001	IV/a	PANITERA PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG
29.	PRAMULIA S.H.	19640726 198603 1 005	III/d	PANITERA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
30.	ADIE TIRTO, S.H.	19680814 199803 1 003	III/d	PANITERA PENGADILAN NEGERI KETAPANG
31.	Y. STEVANUS S.Pd.K	19591111 198402 1001	III/d	PANITERA PENGADILAN NEGERI NGABANG
32.	DJAMIATUL ICHWAN, S.H.	19620114 198603 1 004	III/d	PANITERA PENGADILAN NEGERI SAMBAS
33.	ALI RAHMAN,S.H,M.H.	19690804 199003 1 005	III/d	PANITERA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
34.	TULUS SUWARSO, SH	19661221 198803 1 001	III/d	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
35.	AGUS SUPARMAN	19580922 198303 1 006	III/c	PANITERA PENGADILAN NEGERI SINTANG
36.	MARDANIS, SH	19640814 198903 1 006	III/d	PANITERA PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
37.	AGUS ERWIN HARAHAP, SH., MH	19750801 200112 1003	III/d	PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS TIPIKOR PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
38.	RUSWANTO, S.H.	19691030 199303 1 001	III/d	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SINTANG
39.	JUTINIANUS,S.H.	19830701 200805 1 001	III/c	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
40.	FENDENSIUS HELMI S.H.	19841119 200805 1 001	III/c	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
41.	FERRI YANUARDI, SH	19850129 200805 1 001	III/c	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
42.	ARI, SH	19830420 200912 1 001	III/c	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG
43.	RAMDHAN SUWARDHANI, SH	19820624 201101 1 007	III/c	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG
44.	FERRY PERDINAN	19590224 198310 1 001	III/c	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45.	SYAHRIR RIZA, SH	19760308 200212 1 002	III/c	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI NGABANG
46.	SALIM, S.H.	19630223 198903 1 003	III/c	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SINTANG
47.	MARLINDA PAULINA SIHITE	19690323 199003 2 002	III/b	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
48.	JULFARIDA, SH	19870824 200912 2 003	III/c	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
49.	WARSIDIK	19721027 199403 1 003	III/c	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI SANGGAU
50.	HANNY PUSPASARI, S.H, M.H	19850715 200805 2 002	III/c	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
51.	WISESA, S.H.	19850922 200904 1 002	III/c	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KETAPANG
52.	DEDI SUPRIADI, S.H.	19800726 200904 1 002	III/c	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI SINTANG
53.	HENDAN, S.H.	19650604 199003 1 007	III/c	JURUSITA PENGADILAN NEGERI SAMBAS
54.	RETNO WARDANI, S.H	19880330 201101 2 017	III/b	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
55.	MARLIN YUSTITIA VIKA, S.H	19870316 201101 2 024	III/b	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
56.	FENNY RESTIANTY, SH	19871016 200904 2 003	III/b	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI NGABANG
57.	RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH BORU HUTAGALUNG, S.H.	19870606 201101 2 020	III/b	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI SAMBAS
58.	MARISA EKA PUTRA, S.T., M.Eng	19840715 200904 1 001	III/c	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG (SATGAS SIPP BADILUM)
59.	ST. NINA MAULIA, S.T	19861119 200912 2 005	III/c	ADMIN IT PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
60.	ALFAN RENALDI	19810407 200904 1 003	III/c	ADMIN IT PENGADILAN NEGERI KETAPANG
61.	MUSDIHAN	19670511 198903 1002	III/b	JURUSITA PENGADILAN NEGERI NGABANG
62.	AHMAD FAHRI, S.H.	19900202 201403 1 002	III/b	ADMIN IT PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
63.	LIES ERTANTI, S.E	19840124 201101 2 009	III/b	ADMIN IT PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
64.	YOSEF ADITIA PRAWIGA, S.T.	198606222011011012	III/b	ADMIN IT PENGADILAN NEGERI SINTANG
65.	TIA AYU PRAMITA, A.Md	19881014 200904 2001	III/a	ADMIN IT PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
66.	ULFA MASITHAH, A.Md	19870907 200904 2 003	III/a	ADMIN IT PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
67.	SULASTRI SETYASIH, S.E	19780425 200604 2000	III/a	ADMIN IT PENGADILAN NEGERI NGABANG
68.	SUGENG SUJONO, S.Kom.	198907142015031001	III/a	ADMIN IT PENGADILAN NEGERI SAMBAS

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69.	ALI ASPAR, A.Md.	19811211 200604 1 003	II/d	JURUSITA PENGADILAN NEGERI SAMBAS
70.	EDI SUPRIYANTO	19730403 200604 1 001	II/d	JURUSITA PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
71.	DEDI SUPRAYOGI	19851231 200604 1002	II/d	JURUSITA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
72.	BUDI HARTONO A.Md	19840101 201101 1 015	II/d	ADMIN IT PENGADILAN NEGERI SANGGAU
73.	UTOMO	19821124 200904 1 005	II/c	JURUSITA PENGADILAN NEGERI KETAPANG
74.	ALFA ARNALDI	19770714 200604 1 005	II/c	JURUSITA PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG
75.	AFRIDA DEWI BESTIANA	19840424 200604 2 002	II/c	JURUSITA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
76.	URAY HERRY YANIZAR	19721210 200604 1 001	II/c	JURUSITA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
77.	KHAIRIL ANWAR	19830110 200912 1 005	II/b	JURUSITA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,



[Handwritten signature]

Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.